

## **BAB II**

### **GAMBARAN OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Profil Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2017, jumlah penduduk DIY tercatat sebanyak 5.965.90 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 4,064.60 laki-laki dan 1,901.30 perempuan. Jumlah penduduk DIY dengan laju pertumbuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 tercatat jumlah penduduk DIY sebanyak 3,5 juta jiwa dan meningkat menjadi 1,5 juta jiwa di tahun 2017 dan semakin meningkat di tahun 2025.

Jumlah penduduk ini semakin menjadi 3,9 juta di tahun 2020 berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2010-2020. Pertumbuhan penduduk DIY selama periode 1971-1980 tercatat sebesar 1,10 persen per tahun. Kemudian, laju ini melambat menjadi 0,58 % per tahun di periode 1980-1990 dan 0,72 % per tahun di periode 1990-2000 sebagai dampak keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana dan perbaikan kesehatan penduduk. Hal ditandai oleh membaiknya kesehatan ibu dan balita, sehingga terjadi penurunan angka kematian bayi. Namun, pada periode 2000-2010 pertumbuhan penduduk kembali meningkat menjadi 1,04 % per tahun. Laju pertumbuhan penduduk

tercepat selama empat dekade terjadi di Kabupaten Sleman dan Bantul. Pada periode 2000-2010, kedua daerah memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,9 dan 1,6 % per tahun. Sementara, Kota Yogyakarta justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,2 %. Sebagai pusat perekonomian sekaligus pemerintahan, wilayah Kota Yogyakarta yang terbatas sudah semakin jenuh untuk menampung penduduk akibat meningkatnya aktivitas perekonomian. Dampaknya, terjadi perkembangan kawasan pemukiman yang masih di wilayah yang menjadi penyangga Kota Yogyakarta, terutama di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

**Tabel 2.1**

**Jumlah Penduduk DIY Tahun 2011 - 2016**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
D.I. Yogyakarta	3509997	3552462	3594854	3637116	3679176	3720912
Kulonprogo	394200	398672	403179	407709	412198	416683
Bantul	922104	934674	947072	959445	972511	983527
Gunungkidul	685003	692579	700191	707794	715282	722479
Sleman	1116184	1128943	1141733	1154501	1167481	1180479
Yogyakarta	392506	397594	402679	407667	412704	417744

*Sumber : BPS DIY tahun 2019*

Dengan jumlah penduduk DIY yang meningkat mengakibatkan peningkatan yang terjadi dalam tindak kekerasan. Data kekerasan pada perempuan dan anak memperlihatkan peningkatan kualitas dan kuantitas kasus kekerasan. Ditemukan kasus kekerasan pada laki-laki, namun jumlahnya relatif kecil atau

10 % dari total kekerasan yang dilaporkan. Terjadi peningkatan kasus baik anak laki-laki maupun perempuan, dimana pada tahun 2015 tercatat 1.497 kasus dan meningkat menjadi 1.527 kasus di tahun 2016.

Berdasarkan tingkat pendidikan, korban paling banyak pada anak belum sekolah dan perempuan SLTP, baik menikah atau tidak menikah. Jumlah korban tidak bekerja hampir dua kali lipat korban bekerja. Jumlah data kekerasan 61% terjadi di rumah tangga, 22 % terjadi ditempat umum, 6 % terjadi disekolah dan 1 % terjadi di tempat kerja. Dari sisi pelaku, tercatat 64% pelaku kekerasan adalah keluarga, dimana 42% adalah suami/istri, 16% orang tua dan 6% anggota keluarga yang lain. Pada tahun 2016 juga ditemukan kasus kekerasan dimana korbannya adalah perempuan penyandang disabilitas. Pada perempuan kasus kekerasan tertinggi adalah KDRT, sementara pada anak kasus kekerasan yang terjadi paling banyak adalah kekerasan fisik 27%, psikis 25%, perkosaan 15%, penelantaran 13% dan pencabulan 12%, pelecehan seksual 7% dan 1% eksploitasi.

**Tabel 2.2**

**Jumlah Korban Kekerasan menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di DIY tahun 2016**



*Sumber: BPPM 2016*

Kota Yogyakarta dan Sleman merupakan wilayah dengan jumlah kasus kekerasan yang paling tinggi kasus kekerasan pada perempuan dewasa didominasi oleh KDRT seperti kekerasan fisik dan psikis, sementara kekerasan pada anak terlibat bervariasi seperti penelantaran, pencabulan, pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan fisik dan psikis.

## **1. Pemerintahan**

DIY memiliki keistimewaan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam UU No 13 Tahun 2012 tentang kedudukan hukum DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil; kelembagaan; kebudayaan; pertahanan; dan tata ruang.

Wilayah administrasi DIY terbagi menjadi lima kabupaten/kota, yakni Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman dan kota Yogyakarta. Pusat pemerintahan berada di Kota Yogyakarta. Jumlah kecamatan pada tahun 2015 sebanyak 78 kecamatan dan terbagi menjadi 438 desa/kelurahan. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dalam dua dekade terakhir. Daerah dengan wilayah terluas adalah Gunungkidul sebesar 1.485,4 km atau 46,6 % luas DIY. Sementara, Kota Yogyakarta memiliki wilayah terkecil sebesar 32,5 km atau 0,01 % dari luas wilayah DIY.

Penyelenggara pemerintahan di DIY terdiri dari pemerintah daerah selaku eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku legislatif. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam penyelenggaraan pemerintahan Gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) dan Lembaga Teknis Daerah.

## 2. Visi Misi

### 1. Visi

***“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru”***

Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkarakter dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang lebih memiliki kualitas moral yang positif, memanusiakan manusia sehingga mampu membangun kehidupan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Ini sejalan dengan konsep Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbudaya, dimana interaksi budaya melalui proses inkulturasi dan akulturasi justru mampu memperkokoh budaya lokal, menambah daya tahan serta mengembangkan identitas budaya masyarakat dengan kearifan dan keunggulan lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta yang maju dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata dengan menurunnya ketimpangan antar penduduk dan menurunnya ketimpangan antar wilayah. Visi ini juga menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata – pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta yang mandiri adalah kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan (self-help), mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat yang sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan.

## **2. Misi**

- 1) *Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan*, misi ini mengemban upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya mendorong peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat, serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang dimulai dari kebutuhan fisik sampai sosial.
- 2) *Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif*, misi ini mengemban

upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subjek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif.

- 3) *Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintah yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien, melalui sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor, swasta, dan masyarakat, misi ini mengembun tujuan peningkatan efektifitas layanan birokrasi yang responsif, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.*
- 4) *Memantapkan prasarana dan sarana daerah, Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian tata ruang.*



## **B. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disebut DPRD terletak di Jalan Malioboro No. 54 Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi DPRD ini berada di samping utara Malioboro Mall atau di samping selatan Dinas Pariwisata DIY. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD ini dulunya memiliki bangunan gedung yang bernama *Loge Mataram*. Gedung tersebut memiliki nama resmi pada zaman Belanda dan dinamai dengan bahasa Belanda yaitu *Loge Mataram te Djokajakarta, Nederlands Oost-Indie*. Gedung tersebut dibangun pada tahun 1870 pada masa penjajahan Belanda, maka dari itu semakin banyaknya jumlah orang Belanda maupun Eropa lainnya yang berada di Yogyakarta.

Gedung DPRD yang dulunya disebut *Loge* banyak orang Jawa yang menyebutnya *Loji* yang memiliki makna yaitu sebagai rumah atau gedung yang besar. Mataram sendiri dipahami sebagai para pendiri *Loge* yang sadar akan kebesaran Jawa. Nama *Loge Mataram* ini didasarkan pada keberadaan tempat *loge* yang dibangun tersebut, dimana sebagai tempat pusat kerajaan pewaris trah *Mataram*. *Loge Mataram* ini dulunya sebagai pusat teosofi dan gerakan *Freemasonry*. *Freemasonry* dalam bahasa Belanda disebut *Vrijmetselarij*, yang merupakan organisasi persaudaraan internasional yang sempat berkembang di Hindia Belanda. Penggunaan gedung DPRD pada masa pendudukan Jepang digunakan sebagai *Kantor Agraria*. Kemudian, pada

waktu Yogyakarta menjadi ibu kota Negara Republik Indonesia pada tahun 1946, gedung DPRD ini digunakan oleh DPRD DIY hingga sekarang.

## **1. Keanggotaan**

Jumlah anggota DPRD DIY periode 2014-2019 hasil pemilu Legislatif 2014 sebanyak 55 orang. Komposisinya terdiri dari 48 anggota laki-laki (87,3 %) dan 7 anggota perempuan (12,7 %). Proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen yang cenderung menurun dibandingkan dengan hasil pemilu 2009. Komposisi anggota DPRD periode 2014-2019 menurut parpol pengusung didominasi oleh legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 14 orang (25 %).

Berikutnya adalah Partai Amanat Nasional atau (PAN) dan Partai Golkar masing-masing sebanyak 8 wakil, diikuti oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan wakil masing-masing 7 dan 6 orang. Partai Demokrat mengalami penurunan tajam dari 10 kursi di periode 2009-2014 menjadi 2 kursi di periode 2014-2019. Komposisi keterwakilan perempuan dalam parlemen di semua DPRD kabupaten /kota di DIY masih relatif rendah. Proporsi yang tertinggi tercatat di Kota Yogyakarta sebesar 25 % (10 anggota perempuan dari total 40 anggota). Proporsi terendah tercatat di Kabupaten Bantul sebesar 6,7 % (3 perempuan dari 45 anggota).

## **2. Visi Misi**

### **a. Visi**

“Menjadi Institusi yang profesional, antisipatif dan responsif dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD”

### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Internal
- 2) Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Eksternal
- 3) Menjadi sumber informasi kegiatan DPRD dan studi bidang politik.

## **3. Struktur Organisasi DPRD DIY**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY memiliki struktur organisasi yaitu diantaranya adalah :

**Ketua** : H Yoeke Indra Agung L,SE.

**Wakil** : Arif Noor Hartanto. SIP

Hj. Rany Widiyati, S.E., M.M

Dharma Setiawan. MBA

### **Komisi A (Bidang Pemerintahan)**

Koordinator dari Pimp. Dewan	: H Yoeke Indra Agung L,SE.
Ketua merangkap anggota	: Eko Suwanto, ST, M.Si.
Wakil Ketua merangkap anggota	: Sukarman, S.Pd
Sekretaris merangkap anggota	: Agus Sumartono, S.Si
Anggota	: 1. KPH. Purbodiningrat, SE, MBA 2. Rendradi Suprihandoko, SH, M.Hum. 3. H, Bambang Chisnadi, SH. 4. Sadar Narima, S.Ag, SH. 5. Slamet, S.Pd, MM 6. Albani S.T. 7. Subarno 8. Drs. H. Edy Susila

Komisi A ini menangani permasalahan yang terkait dengan bidang pemerintahan meliputi pemerintahan umum, ketentraman dan keterlibatan, otonomi daerah, pengawasan, organisasi kemasyarakatan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan sosial politik, kependudukan, hubungan manusia, perizinan, pertahanan, statistik, pemadaman kebakaran, kepegawaian/aparatur, kerjasama luar negeri dan dalam negeri, pendidikan

dan pelatihan, pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, sekretariat DPRD.

**Komisi B (Bidang Perekonomian dan Keuangan)**

Koordinator dari Pimp. Dewan : Hj. Rany Widiyati, S.E., M.M

Ketua merangkap anggota : Janu Ismadi, SE

Wakil Ketua merangkap anggota : RB.Dwi Wahyu B, S.Pd, M.Si

Sekretaris merangkap anggota : Suparja, S.IP

Anggota : 1. Joko B Purnomo

2. Drs. Sudarto

3. Dra Hj. Marthia Adelheida

4. Arif Setiadi, S,IP

5. H. Septyo Wiboeo, SE

6. Ir. Arief Budiono

7. Drs. Aslam Ridho

8. Nunung Ida Mundarsih, S.Pd.

Komisi B ini menangani permasalahan yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, logistik, kehutanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, keuangan daerah, pendapatan daerah dan pelayanan pajak, pengelolaan aset daerah, perbankan, administarsi

keuangan daerah, badan usaha milik negara yang ada di daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

**Komisi C (Bidang Pembangunan)**

- Koordinator dari Pimp. Dewan : Dharma Setyawan. MBA
- Ketua merangkap anggota : H. Muhammad Zufri Hudaya, S.T.
- Wakil Ketua merangkap anggota : Drs. Agus Subagyo
- Sekretaris merangkap anggota : Gimmy Rusdin S, SE
- Anggota : 1. Chang Wendryanto, S.H.  
2. GM. Totok Hedi Santosa.  
3. Suharwanta, S.T.  
4. Hj. Masria Widyo S.E  
5. Agus Sumaryanto, S.T.  
6. Anton Prabu Semendawai, S.H.  
7. Suroyo  
8. Huda Tri Yudiana, S.T.  
9. H.Sukanto, S.H.  
10. Sudaryanto, SH  
11. Sambudi S.T  
12. Hj. Erlia Risti, S.E.

Komisi C ini mengenai permasalahan meliputi penataan ruang, kebinamargaan, pekerjaan umum, pengelolaan daerah aliran sungai, perencanaan pembangunan daerah, perhubungan, irigasi, komunikasi dan informatika, perumahan rakyat, lingkungan hidup, pertambangan dan energi.

**Komisi D (Bidang Kesejahteraan)**

Koordinator dari Pimp. Dewan : H Yoeke Indra Agung L, SE.

Ketua merangkap anggota : H. Kuswanto, S.IP

Wakil Ketua merangkap anggota : Nur Sasmito

Sekretaris merangkap anggota : Drs. H. Suwardi

Anggota : 1. Tustiyani, SH

2. Nuryadi, S.Pd

3. Ir. Atmaji

4. Ir. Hanam Mutaqin

5. Nurjannah

6. H. Yoserizal, SH

7. Danang Wahyu Broto, Se., M.Si

8. Nandar Winoro, ST

9. Soleh Wibowo, S.Ag

10. Endang Setyani, S.H

11. H. Muhammad Yazid S.Ag

Komisi D ini mengenai permasalahan yang meliputi pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, kesehatan, keluarga berencana, keternagakerjaan, pemberantasan penyakit menular dan kejadian luar biasa, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, sosial, peranan wanita, transmigrasi, cagar budaya dan museum, perpustakaan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana.

### **C. Dinas Perbedayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta**

#### **1. Sejarah**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta yang semula berasal dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004. Kemudian berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ketugasan dan fungsi sebagaimana diatur



dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) mempunyai menyelesaikan tugas Gubernur melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

## **2. Visi Misi**

**Visi :** Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

**Misi :**

- a. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban
- b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

**Moto :** Semangat, Tangguh, Sejahtera

## **3. Program Kegiatan Tahunan**

Beberapa Program DP3AP2 DIY:

- a. Program Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan
- d. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- e. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
- f. Program Pengendalian Pertumbuhan Penduduk
- g. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

#### 4. Strategi Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

**Misi 1 : *Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban***

**Tabel 2.3**

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Derajat Kualitas hidup sosial Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat implementasi dan advokasi pengarusutamaan Gender</li> <li>• Meningkatkan pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Mengendalikan pertumbuhan penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> <li>• Pengendalian usia perwakinan pertama penduduk</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</li> <li>• Peningkatan akses dan kualitas</li> </ul>

			Keluarga Berencana
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk Kelompok Desa Prima Sejahtera baru</li> <li>• Meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik melalui advokasi dan penguatan kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilih perempuan</li> <li>• Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan, penanganan dan pemberdayaan</li> <li>• Meningkatkan level capaian KLA di DIY melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA di prov dan kab/kota</li> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan korban melalui lembaga layanan (P2TPA, LPPA,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Desa Prima Sejahtera baru di fokuskan di daerah tertinggal/msikin.</li> <li>• Peningkatan perempuan pengambil keputusan di ranah publik dengan diprioritaskan pada penguatan kapasitas pada perempuan dan advokasi lembaga</li> <li>• Percepatan penurunan prevalensi pada perempuan dan anak diprioritaskan pada kegiatan pencegahan dengan memperkuat jejaring antar lembaga</li> <li>• Peningkatan level capaian KLA di DIY melalui peningkatan kapasitas gugus tugas KLA terutama di Kab. Bantul yang belum</li> </ul>

		Rifka Annisa, lembaga lain)	mencapai level terendah dah KLA (pratama) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan korban terutama RDU</li> </ul>
3	Meningkatnya Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan melalui KIE	Penyusunan Kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk pada usia kawin perempuan
4	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk sistem konseling keluarga yang lebih holistik dan intergrative</li> <li>• Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan sistem konseling keluarga yang holistik dan integratif sesuai dengan rancangan Grand Design Ketahanan Keluarga.</li> <li>• Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</li> </ul>

**Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang**

***Demokratis***

5	Meningkatnya kapasitas tata kelola	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan,	
---	------------------------------------	--	--

	pemerintahan	penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif).	
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi	Meningkatkan efektifitas kinerja SKPD	Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja SKPD